



KAJIAN DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN MITRA KERJA KOMISI X DPR-RI



BADAN KEAHLIAN
DPR RI



bk_dprri



Badan Keahlian DPR RI

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025

Pendahuluan

Efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan negara menjadi isu yang semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal global dan kebutuhan untuk memastikan penggunaan dana publik yang efektif dan akuntabel. Kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan fiskal yang ada. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan efisiensi anggaran pada belanja K/L dengan total penghematan sebesar Rp256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres No. 1 Tahun 2025) untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya.

Efisiensi anggaran ini menjadi semakin krusial dalam sektor pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, riset, statistik, dan perpustakaan yang merupakan pilar pembangunan sumber daya manusia dan inovasi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2024). Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Komisi X DPR RI atas bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan inovasi, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, dan statistik dan bermitra dengan beberapa K/L yang menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut. Komisi X DPR RI memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh K/L mitra Komisi X DPR RI. Efisiensi anggaran yang diterapkan secara tidak tepat dapat berisiko menurunkan kualitas pendidikan, memengaruhi pemajuan kebudayaan, memperlambat kemajuan riset, dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia (Widoyono, et al., 2016). Untuk itu, Komisi X DPR RI memerlukan pemahaman komprehensif tentang dampak kebijakan ini untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu kualitas layanan publik, terutama dalam sektor-sektor strategis. Berdasarkan beberapa hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran K/L Tahun Anggaran 2025, khususnya di kementerian/lembaga mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, BPS, dan BRIN.

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Inpres No. 1 Tahun 2025 menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah) untuk anggaran K/L dan Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari transfer ke daerah. Rencana efisiensi anggaran mencakup belanja operasional dan non operasional, perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin dan tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Inpres ini memiliki dampak signifikan terhadap dampak kebijakan anggaran. Target efisiensi anggaran untuk seluruh K/L ini tergambar dari Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Efisiensi Belanja K/L TA 2025

Nama Data	Nilai
Anggaran K/L APBN 2025	1,16 Kuadriliun
Target Efisiensi	-256,1 Triliun
Estimasi Sisa Anggaran	903,99 Triliun

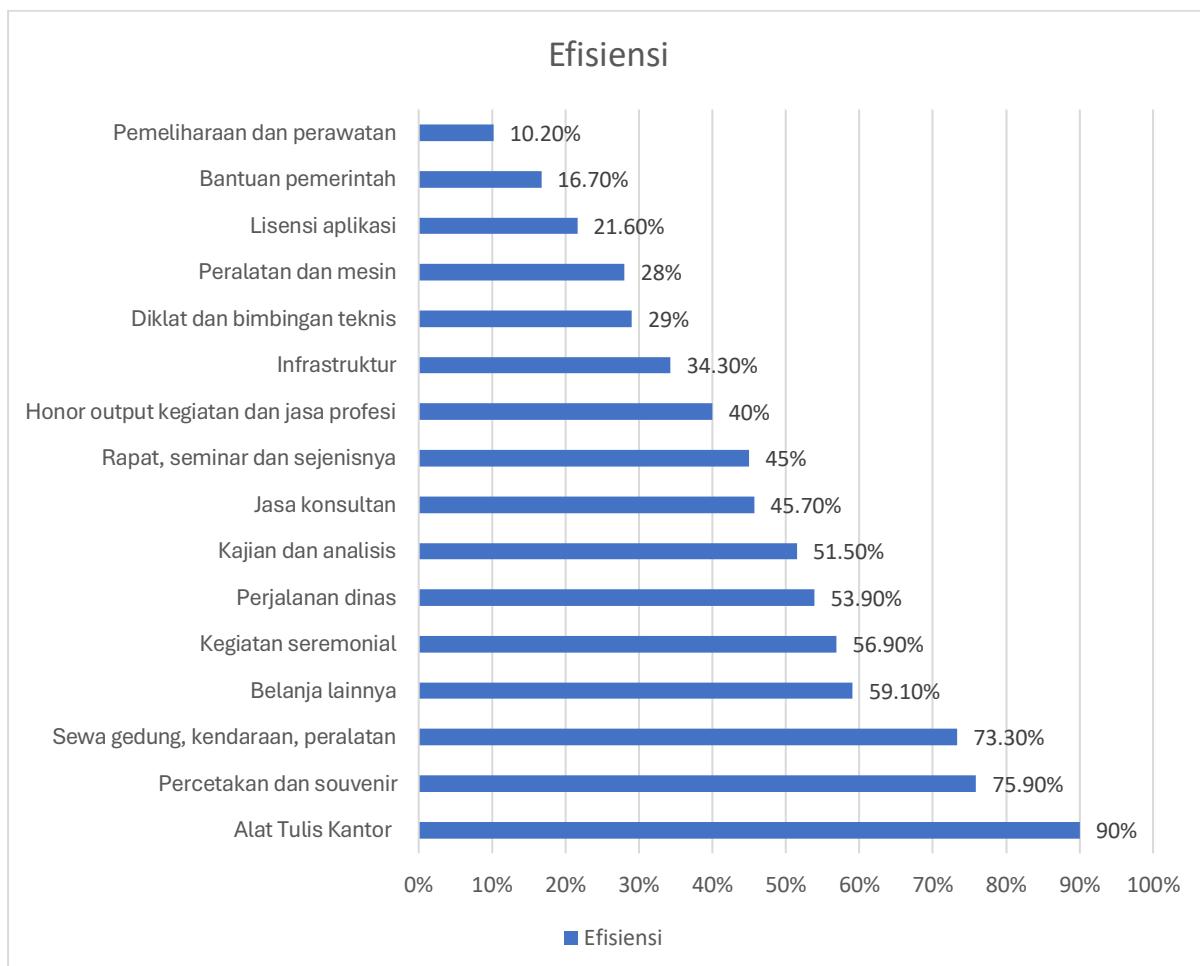
Sumber: Ahdiat, 2025

Berdasarkan Tabel 1, telah terjadi pengurangan dari total anggaran sebesar Rp256,1 triliun atau setara dengan 22,07 persen dari anggaran K/L di APBN 2025. Hal ini menunjukkan hampir seperempat dari total anggaran K/L telah dipotong atau dihemat, sedangkan sisanya sebesar 77,93 persen dari anggaran akan tetap digunakan untuk mendanai program dan operasional yang dianggap prioritas dan esensial. Ini berarti pemerintah menargetkan pengurangan belanja negara secara signifikan dalam rangka optimalisasi penggunaan dana publik, perbaikan dalam manajemen keuangan dan tata kelola anggaran, disiplin fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan potensi defisit anggaran.

Untuk efisiensi anggaran ini K/L dan pemerintah daerah, harus melakukan beberapa langkah strategis ini:

1. pemotongan biaya operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin;
2. pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
3. pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
4. pembatasan belanja honorarium; mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* terukur;
5. fokus pada alokasi anggaran pelayanan publik; dan
6. lebih selektif dalam memberikan hibah.

Besarnya persentase efisiensi pada berbagai komponen belanja K/L tersebut dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Komponen Anggaran yang mendapatkan Efisiensi Belanja K/L

Sumber: Estherina, 2025

Berdasarkan Grafik 1, komponen dengan tingkat efisiensi tertinggi adalah alat tulis kantor (90 persen), percetakan dan suvenir (75,9 persen), serta sewa gedung, kendaraan, dan peralatan (73,3 persen), sedangkan komponen dengan efisiensi terendah adalah pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen), bantuan pemerintah (16,7 persen), dan lisensi aplikasi (21,6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa penghematan terbesar difokuskan pada pengeluaran operasional yang dianggap non-esensial, sementara efisiensi pada komponen yang berkaitan dengan pemeliharaan dan dukungan langsung terhadap tugas dan fungsi instansi dilakukan secara lebih hati-hati.

Beberapa pembatasan tersebut menunjukkan adanya potensi yang memengaruhi pelaksanaan berbagai program dan layanan publik di K/L yang sekaligus menjadi tantangan bagi setiap K/L. Hal ini menuntut agar setiap K/L dan pemerintah daerah harus lebih selektif dalam merencanakan dan melaksanakan program-program yang tidak langsung berdampak pada pelayanan publik. Untuk itu, Menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi yang telah mendapat

persetujuan Komisi DPR RI kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas alokasi belanja pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel 2. Rencana Efisiensi Belanja K/L Mitra Kerja Komisi X DPR RI TA 2025

Kementerian/ Lembaga	Anggaran Semula	Efisiensi	% Efisiensi	Anggaran Setelah Efisiensi
Kemdikdasmen	33.5545.177.876.000	8.035.471.000.000	23,95	327.509.706.876.000
Kemendiktisaintek	57.681.294.991.000	22.546.328.000.000	39,09	35.134.966.991.000
Kemenbud	2.374.348.189.000	1.390.595.000.000	58,57	983.753.189.000
Kemenpora	2.330.383.940.000	1.466.195.000.000	62,9	864.188.940.000
Perpusnas RI	721.684.480.000	361.699.000.000	50,12	359.985.480.000
BRIN	5.842.259.586.000	2.074.897.000.000	35,52	3.767.362.586.000
BPS	5.705.872.675.000	2.024.593.000.000	35,48	3.681.279.675.000

Sumber: Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

Kemdikdasmen

Pemotongan anggaran sebesar Rp 8,03 triliun (23,95%) terhadap Kemendikdasmen akan berdampak luas pada sektor pendidikan dasar, terutama dalam pembinaan sekolah dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Dampaknya meliputi:

1. Dampak pada Program dan Kegiatan

- **Pendidikan Dasar:** Berkurangnya alokasi dana dapat memengaruhi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menjadi sumber utama pendanaan sekolah, terutama di daerah terpencil.
- **Kesejahteraan Guru:** Pemotongan bisa berdampak pada tunjangan profesi guru, insentif bagi guru honorer, serta program sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran.
- **Dinas Pendidikan Daerah:** Dengan anggaran yang lebih kecil, efektivitas pengelolaan pendidikan di tingkat daerah, termasuk supervisi dan koordinasi sekolah, bisa melemah.

Pemerintah menyatakan bahwa pemangkasan dilakukan untuk menghapus belanja dengan **output yang tidak terukur**. Namun, pendekatan ini kurang tepat untuk sektor pendidikan karena **output bukanlah ukuran utama keberhasilan pendidikan—outcome jauh lebih penting**. Pendidikan bukan sekadar proyek yang menghasilkan barang dalam waktu singkat, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya baru terlihat bertahun-tahun kemudian.

Jika hanya fokus pada belanja yang bisa langsung diukur secara kuantitatif, ada risiko bahwa program-program fundamental seperti pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas kurikulum akan terabaikan. Padahal, dampak pendidikan **tidak bisa diukur dalam satu periode anggaran**, melainkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

2. Sejauh Mana Kebijakan Ini Memengaruhi Program Prioritas di Sektor Terkait

- **Dana BOS dan Infrastruktur Sekolah**

Berkurangnya anggaran dapat menyebabkan keterlambatan distribusi dana BOS atau tertundanya pembangunan sarana belajar di daerah yang masih kekurangan fasilitas.

- **Peningkatan Kompetensi Guru**
Jika anggaran pelatihan guru dikurangi, maka peningkatan kualitas pengajaran bisa terhambat, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan berkualitas.
- **Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran Digital**
Transformasi digital dalam pendidikan dasar bisa melambat karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

3. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Pencapaian Target Program K/L

- **Pendekatan Outcome-Based Budgeting (OBB)**
Anggaran harus dialokasikan berdasarkan dampak jangka panjang, bukan hanya pada hasil yang mudah diukur dalam satu tahun anggaran.
- **Fokus pada Sekolah yang Paling Membutuhkan**
Prioritaskan alokasi dana ke sekolah-sekolah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya.
- **Optimalisasi Peran Dinas Pendidikan Daerah**
Sinergi dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar efektivitas kebijakan tetap terjaga meskipun terjadi pemangkasan anggaran pusat.

4. Efisiensi Program dengan Digitalisasi dan Transformasi Kebijakan

- **Pelatihan Guru Berbasis Digital**
Manfaatkan platform daring untuk meningkatkan kompetensi guru guna mengurangi biaya pelatihan tatap muka. Saat ini guru sudah mulai terbiasa dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang perlu dimaksimalkan dan difokuskan pada keterampilan yang penting bagi guru.
- **Penerapan Sistem Administrasi Pendidikan Digital**
Digitalisasi pengelolaan BOS dan administrasi sekolah dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi. Selain itu, hal ini dapat memotong rantai birokrasi.
- **Kolaborasi dengan Sektor Swasta**
Mendorong kerja sama dengan perusahaan teknologi dan lembaga pendidikan non-pemerintah untuk mendukung digitalisasi pendidikan dasar.

5. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Kementerian Terkait

- **Pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB)**
Evaluasi program yang kurang berdampak untuk memastikan anggaran dialokasikan secara lebih efektif.
- **Outcome-Based Budgeting**
Fokus pada indikator kinerja utama seperti peningkatan literasi dan numerasi siswa sebagaimana Asta Cita Presiden yang ke-empat. Fokus pada mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.
- **Matching Fund untuk Program Pendidikan Digital**
Mendorong skema pendanaan berbasis kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mempercepat digitalisasi sekolah.

Kemendiktisaintek

Pemotongan anggaran sebesar Rp 22,55 triliun (39,09%) terhadap Kemendiktisaintek akan berdampak signifikan terhadap beberapa sektor utama.

1. Dampak pada Program dan Kegiatan

- Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi**

Pengurangan dana dapat memengaruhi alokasi subsidi pendidikan tinggi seperti beasiswa LPDP dan KIP Kuliah. Selain itu, rentan pemotongan program populer seperti magang merdeka kampus merdeka dan beasiswa ISMA.

- Pembatasan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Dalam menyikapi pemotongan anggaran, kampus menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam penggunaan sarana dan prasarana guna memastikan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Beberapa langkah yang diambil, antara lain:

- Penggunaan Listrik yang Bijak: Kampus mengimbau seluruh civitas akademika untuk menghemat listrik, misalnya dengan mematikan lampu, pendingin ruangan, dan perangkat elektronik yang tidak digunakan.
- Pembatasan Waktu Penggunaan Fasilitas: Penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya dibatasi hingga pukul 17.00, kecuali untuk kegiatan akademik yang telah mendapat izin khusus. Bahkan operasional lift dimatikan.

Hal ini dapat membatasi produktivitas di perguruan tinggi tersebut.

- Peningkatan Kompetensi Dosen.** Program sertifikasi dan pelatihan dosen dapat mengalami keterbatasan, yang berpotensi berdampak pada kualitas pendidikan.

- Pembayaran Tukin Dosen**

Kemendiktisaintek juga akan sulit untuk mencairkan tunjangan kinerja dosen PNS yang berada di bawah Kemendiktisaintek yang dituntut akhir-akhir ini. Kementerian Keuangan hanya menyetujui anggaran Rp 2,5 Triliun untuk pemberian Tukin pegawai ASN di lingkungan Kemendiktisaintek (Yusrizal, 2025). Artinya, kemungkinan hanya cukup untuk membayar tukin di tahun ini. Sementara yang diharapkan dosen adalah tukin dari 2020 sampai 2024. Selain itu, ada kemungkinan perampingan sumber daya manusia dengan merumahkan tenaga non-ASN untuk menghemat pengeluaran.

- Penelitian dan Inovasi**

Dana riset bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian berpotensi berkurang, yang dapat menghambat inovasi dalam bidang sains dan teknologi. Perguruan tinggi telah menyikapi kebijakan efisiensi dengan meminimalkan anggaran riset dan pengabdian masyarakat.

- Transformasi Digital dalam Pendidikan**

Jika tidak diprioritaskan, pengurangan anggaran dapat memperlambat implementasi digitalisasi pendidikan di sekolah dan kampus.

2. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Pencapaian Target Program K/L

Agar target utama tetap tercapai, strategi optimalisasi berikut dapat diterapkan:

- Penguatan Skema Pendanaan Mandiri untuk Perguruan Tinggi**

Mendorong kampus untuk meningkatkan pendapatan dari kerja sama industri dan program kemitraan internasional.

- **Prioritasi Program Berbasis Dampak**

Menyusun ulang skala prioritas program, memastikan dana yang tersedia digunakan untuk program dengan dampak terbesar bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

- **Efisiensi Operasional dan Digitalisasi**

Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi beban administrasi, perjalanan dinas, dan kegiatan yang bisa dialihkan ke model daring.

3. Efisiensi Program dengan Digitalisasi dan Transformasi Kebijakan

- **Pembelajaran Digital dan Hybrid Learning**

Mendorong pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk mengurangi biaya pembelajaran konvensional.

- **E-Training untuk Dosen**

Pelatihan berbasis daring dapat menghemat biaya perjalanan dan akomodasi tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

- **Integrasi Data Pendidikan**

Menggunakan sistem terpusat berbasis cloud untuk mengoptimalkan manajemen kampus, sehingga mengurangi biaya operasional manual.

4. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Kementerian Terkait

- **Pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB)**

Setiap program harus memiliki justifikasi anggaran berdasarkan manfaat dan efektivitasnya.

- **Outcome-Based Budgeting**

Pengalokasian anggaran berdasarkan capaian nyata, seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan atau peningkatan jumlah riset yang berdampak pada industri.

- **Matching Fund dan Hibah Kompetitif**

Mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mencari pendanaan tambahan dari sektor swasta atau hibah internasional guna mengurangi ketergantungan pada APBN.

Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun (Siswanto, 2025).

1. Dampak pada Program dan Kegiatan

- **Pembinaan Atlet dan Prestasi Olahraga**

Pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengganggu program pembinaan atlet terutama pada persiapan untuk kompetisi, serta partisipasi dalam event internasional. Hal ini berpotensi menurunkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat global.

- **Pengembangan Pemuda**

Program yang bertujuan meningkatkan daya saing pemuda dan pengembangan kepramukaan mungkin akan mengalami penyesuaian atau pengurangan. Hal ini dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

- **Pengembangan Infrastruktur Olahraga.**

Dengan anggaran yang lebih terbatas, pembangunan, perbaikan serta pemenuhan fasilitas sarana prasarana olahraga khususnya olahraga prestasi berpotensi tidak dapat dipenuhi pada Tahun Anggaran 2025.

2. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Pencapaian Target Program K/L

- **Prioritasi Program**

Kemenpora perlu mengidentifikasi program-program prioritas yang sejalan dengan agenda olahraga prestasi baik nasional maupun internasional secara maksimal. Hal ini bertujuan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal.

- **Efisiensi Operasional**

Pengurangan belanja operasional dan non-operasional harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya perjalanan dinas atau menyelenggarakan pelatihan secara daring.

- **Kemitraan dan Sponsorship**

Perlu ditingkatkan kerja sama dengan pihak swasta, BUMN, dan organisasi internasional untuk mendapatkan dukungan finansial maupun non-finansial. Hal ini dapat membantu mendanai program-program yang terdampak pemotongan anggaran. Kemenpora perlu melakukan optimalisasi kemitraan dan sponsorship melalui LPDUK.

3. Efisiensi Program dengan Digitalisasi Pada Program Kepemudaan

- **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data**

Memanfaatkan sistem manajemen digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran dan program.

- **Kegiatan Pemuda Berbasis Teknologi**

Mengalihkan seminar dan pelatihan kepemudaan ke model hybrid (online dan offline) untuk menjangkau lebih banyak peserta dengan biaya lebih rendah.

4. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Kementerian Terkait

- **Pendekatan Zero-Based Budgeting (ZBB)**

Setiap program harus dikaji ulang dari nol dan hanya mendapatkan anggaran jika terbukti efektif dan efisien.

- **Outcome-Based Budgeting**

Alokasi anggaran diberikan berdasarkan capaian konkret, bukan sekadar output administratif.

- **Incentive-Based Funding**

Program yang berhasil mencapai target dengan efisiensi tinggi bisa mendapatkan tambahan alokasi di periode berikutnya sebagai bentuk insentif.

5. Risiko dan Mitigasi

- **Penurunan Kualitas Layanan**

Pemotongan anggaran lebih dari setengah pagu dapat berisiko mengorbankan kualitas layanan publik (Pusparisa, 2025). Untuk mengatasi hal ini, Kemenpora harus memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Dengan anggaran yang lebih terbatas, Kemenpora perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, akuntabilitas dalam setiap pengeluaran harus dijaga untuk memastikan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Kementerian Kebudayaan

Kementerian Kebudayaan mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,39 triliun atau 58,57% dari pagu awal sebesar Rp 2,37 triliun.

1. Dampak pada Program dan Kegiatan

- Program **pelestarian warisan budaya**, termasuk situs sejarah, museum, dan cagar budaya, bisa mengalami keterbatasan dalam pendanaan untuk perawatan dan restorasi.
- **Dukungan finansial untuk seniman dan budayawan** dapat berkurang, sehingga mereka kesulitan mendapatkan bantuan hibah atau pendanaan untuk proyek seni dan budaya.
- **Pemotongan perjalanan dinas ke luar negeri pada program diplomasi pertukaran budaya antarnegara** mungkin mengalami pemangkasan, mengurangi kesempatan Indonesia dalam mempromosikan budaya lokal di tingkat internasional.

2. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Pencapaian Target Program K/L

- Menyusun daftar program berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pelestarian budaya serta kesejahteraan seniman dan masyarakat.
- Mengutamakan program yang mendukung **pelestarian warisan budaya, pembinaan seniman muda, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya** yang sesuai dengan pagu operasional Kementerian Kebudayaan

- Mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak esensial dan lebih banyak menggunakan **rapat daring**.
- *Sharing burden* pembiayaan program serupa dengan kementerian lain, misalnya bekerja sama dengan **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** untuk program berbasis budaya dan pariwisata.
- Meningkatkan keterlibatan **relawan budaya dan komunitas seni** untuk membantu pelaksanaan program dengan anggaran yang lebih efisien.

3. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Kementerian Terkait

Anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting/PBB) adalah pendekatan pengelolaan anggaran yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil (output & outcome) daripada sekadar penggunaan dana. Dalam menghadapi **pemotongan anggaran**, skema ini membantu pemerintah mengalokasikan dana secara lebih tepat guna dengan fokus pada **kinerja dan hasil nyata dari program-program yang dijalankan**.

- **Klasifikasi Program Berdasarkan Prioritas dan Urgensi**

Program Prioritas Tinggi: Program yang memberikan dampak langsung dan luas (misalnya festival budaya nasional, digitalisasi cagar budaya, atau pendidikan seni bagi masyarakat).

Program Menengah: Program yang dapat disesuaikan atau dikombinasikan dengan program lain untuk mengurangi biaya tanpa kehilangan manfaat.

Program Prioritas Rendah: Program yang bisa ditunda pelaksanaanya pada tahun 2025.

- **Evaluasi Program Berbasis Hasil (Outcome-Based Analysis)**

Program yang memberikan dampak besar (misalnya peningkatan apresiasi budaya, peningkatan wisata budaya, pelestarian warisan budaya) tetap dipertahankan.

Program dengan efektivitas rendah atau yang tumpang tindih dialihkan atau dihentikan sementara.

Perpusnas

1. Dampak pada Program dan Kegiatan

Pemangkasan anggaran Perpusnas RI sebesar Rp 361,69 miliar (50,12%) dari total pagu awal Rp 721,68 miliar akan berdampak signifikan pada program-program yang mendukung peningkatan literasi di Indonesia. Beberapa dampak utama meliputi:

- **Tertundanya Target Peningkatan Literasi**
Pemotongan anggaran berpotensi memperlambat pencapaian target literasi nasional, terutama bagi masyarakat di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap bahan bacaan.
- **Terhambatnya kelanjutan Gerakan Gemar Membaca**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan buku dan fasilitas perpustakaan keliling. Dengan anggaran yang berkurang, distribusi buku ke daerah-daerah terpencil bisa terganggu.
- **Keterbatasan Dukungan untuk Perpustakaan Daerah**
Perpusnas memiliki peran strategis dalam mendukung perpustakaan daerah, termasuk penyediaan koleksi buku, digitalisasi arsip, dan penguatan tenaga perpustakaan. Pemangkasan anggaran dapat menghambat penguatan ekosistem literasi di daerah.

2. Sejauh Mana Kebijakan Ini Memengaruhi Program Prioritas

- **Program Digitalisasi dan Perpustakaan Digital**

Digitalisasi koleksi buku, jurnal, dan arsip penting bagi peningkatan akses literasi. Namun, dengan anggaran yang terbatas, proses penyediaan buku digital dapat terhambat. Penyediaan buku untuk digitalisasi juga membutuhkan biaya.

- **Perpustakaan Keliling dan Akses Buku Gratis**

Berkurangnya anggaran berisiko mengurangi jumlah perpustakaan keliling yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

- **Pelatihan Pustakawan dan Tenaga Literasi**

Program peningkatan kapasitas pustakawan untuk mendukung literasi berbasis komunitas bisa terganggu akibat keterbatasan dana pelatihan.

3. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Target Program

- **Fokus pada Digitalisasi Terukur**

Memprioritaskan pengembangan perpustakaan digital dan e-book agar tetap dapat menjangkau masyarakat luas meskipun dengan sumber daya terbatas. Kegiatan seremonial Perpusnas seyogyanya menjadi promosi yang baik untuk menumbuhkan minat baca, namun jika anggaran ini diefisiensikan maka dapat menggunakan media-media digital.

- **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Swasta**

Memanfaatkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung program literasi dan distribusi buku. Swasta juga bisa didorong untuk mendanai program literasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

- **Efisiensi dalam Distribusi Buku**

Memanfaatkan teknologi untuk menentukan daerah prioritas berdasarkan tingkat literasi rendah, sehingga distribusi buku lebih tepat sasaran.

4. Efisiensi Program dengan Digitalisasi dan Transformasi Kebijakan

- **Penguatan Platform Digital Perpusnas**

Memaksimalkan layanan seperti iPusnas agar masyarakat dapat mengakses buku digital dengan lebih mudah.

- **Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data**

Menganalisis tren membaca masyarakat untuk mengoptimalkan koleksi buku yang paling dibutuhkan.

- **Penyederhanaan Prosedur dan Administrasi**

Mengurangi birokrasi yang tidak esensial dalam distribusi buku dan pelaksanaan program literasi.

5. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Perpusnas

- **Pendekatan Outcome-Based Budgeting (OBB)**

Fokus pada pencapaian peningkatan literasi nasional dibandingkan sekadar jumlah buku yang didistribusikan atau penambahan jumlah perpustakaan daerah.

- **Skema Hibah dan Kemitraan dengan Swasta**

Mendorong perusahaan teknologi dan penerbit untuk berkontribusi dalam penyediaan buku digital dan program literasi. Meningkatkan dan memperkuat platform perpustakaan digital baik secara nasional (iPusnas) maupun di daerah.

- Penguatan Pendanaan Berbasis Kinerja

Mengalokasikan anggaran berdasarkan efektivitas program dalam meningkatkan literasi di daerah tertinggal.

BRIN

1. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Riset dan Inovasi

Pemangkasan anggaran BRIN sebesar Rp 2,07 triliun (35,52%) dari total pagu awal Rp 5,84 triliun berisiko menghambat pencapaian target Indonesia dalam meningkatkan peringkat Global Innovation Index (GII) serta mendorong riset dan pengembangan (R&D) di sektor industri. Beberapa dampak utama meliputi:

- Terhambatnya Inisiatif Peningkatan Inovasi
BRIN bertanggung jawab menaikkan peringkat GII Indonesia ke posisi 49 pada 2029. Pemotongan anggaran bisa memperlambat inisiatif strategis yang mendukung inovasi nasional.
- Risiko Penurunan Investasi R&D oleh Swasta
BRIN memiliki peran sebagai fasilitator yang mendorong investasi litbang oleh sektor industri. Dengan anggaran yang berkurang, peran ini bisa melemah, sehingga target belanja litbang nasional sebesar 1% dari PDB (di mana 80% berasal dari swasta) sulit dicapai.
- Pengurangan Dukungan bagi Startup dan Industri Riset
BRIN seharusnya memfasilitasi riset untuk industri agar inovasi tumbuh di sektor privat, bukan sekadar memperbesar kelembagaan BRIN sendiri. Pemotongan dana bisa menyebabkan berkurangnya insentif bagi industri untuk terlibat dalam litbang.

2. Sejauh Mana Kebijakan Ini Memengaruhi Program Prioritas

- Pendanaan untuk Riset Berbasis Industri
Riset yang seharusnya dikembangkan bersama industri bisa terhambat akibat keterbatasan dana operasional.
- Program Penguatan Ekosistem Inovasi
Upaya membangun jejaring riset antara universitas, industri, dan pemerintah bisa terhambat karena keterbatasan anggaran.
- Pengurangan Skema Insentif untuk Swasta
Kurangnya dana dapat mengurangi skema insentif seperti hibah riset atau tax deduction bagi perusahaan yang berinvestasi dalam litbang.

3. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Target BRIN

- Fokus pada Skema Pendanaan Berbasis Kinerja
Menargetkan riset dengan potensi komersialisasi tinggi dan mengalokasikan anggaran ke proyek yang memiliki dampak ekonomi nyata.
- Kolaborasi dengan Swasta dan Akademisi
Mengoptimalkan kerja sama dengan industri dan universitas untuk meningkatkan pembiayaan riset non-APBN.
- Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Infrastruktur Riset
Memangkas anggaran yang kurang relevan untuk memperkuat peran BRIN sebagai fasilitator riset industri.

4. Efisiensi Program dengan Digitalisasi dan Transformasi Kebijakan

- Pembangunan Data Riset Terintegrasi
Memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data untuk memetakan kebutuhan riset nasional serta meningkatkan efektivitas pendanaan.
- Platform Pendanaan Berbasis Digital
Menerapkan sistem pendanaan kompetitif berbasis digital agar riset yang didanai memiliki dampak yang lebih terukur.
- Optimalisasi Penggunaan Fasilitas Riset Nasional
Mendorong penggunaan laboratorium dan fasilitas riset secara bersama antara lembaga akademik, industri, dan pemerintah.

5. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk BRIN

- Pendekatan *Outcome-Based Budgeting* (OBB)
Fokus pada peningkatan investasi riset oleh industri, bukan sekadar peningkatan jumlah proyek riset di BRIN.
- Mekanisme *Matching Fund*
BRIN secara konsisten menekankan upaya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada APBN dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Tujuan utama BRIN adalah menjadi enabler bagi swasta untuk terlibat dalam riset dan inovasi. Oleh karena itu, perlu didorong skema pendanaan yang mengharuskan industri untuk berkontribusi dalam pembiayaan riset.
- Insentif Pajak bagi Riset Swasta
Memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk litbang, guna mencapai target belanja litbang 80% dari sektor swasta.

BPS

Badan Pusat Statistik mengalami pemangkasan anggaran sebesar 35,48% dari 5.705.872.675.000 menjadi 2.024.593.000.000.

1. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

- Pemotongan anggaran dapat menyebabkan beberapa **survei berkala (seperti survei tenaga kerja, survei sosial ekonomi nasional, dan survei pertanian)** menjadi jarang dilakukan atau dikurangi cakupannya.
- Tanpa anggaran yang memadai, pemutakhiran **data kependudukan, kemiskinan, inflasi, dan sektor lainnya** bisa tertunda atau dilakukan dengan metode yang kurang komprehensif

2. Strategi Optimalisasi Anggaran agar Efisiensi Tidak Menghambat Target BRIN

- Menentukan Prioritas Program Statistik yang Berdampak Besar seperti Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
- Meminimalkan **perjalanan dinas** dan rapat fisik dengan menggantinya menggunakan **pertemuan daring**.
- Meningkatkan penggunaan **big data dan artificial intelligence (AI)** untuk mengurangi ketergantungan pada survei manual.
- Meningkatkan kapasitas komputasi berbasis **cloud computing** untuk menghemat biaya penyimpanan dan pengelolaan data besar (big data).
- Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan universitas untuk **mendukung riset dan analisis data statistik tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan**.
- Mendorong **penggunaan open-source tools** dalam analisis statistik untuk mengurangi biaya lisensi software maha

3. Usulan Skema Anggaran Berbasis Kinerja untuk Kementerian Terkait

- Program dengan **efek langsung terhadap kebijakan nasional tetap dipertahankan**, sementara yang dampaknya kurang signifikan **bisa dikurangi skalanya**.
- Setiap unit kerja di BPS dievaluasi berdasarkan **output dan efektivitas penggunaan anggaran**.

Penutup

Kebijakan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengoptimalkan penggunaan dana publik. Namun, efisiensi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kebudayaan, riset, dan statistik yang berdampak langsung pada pembangunan sumber daya manusia dan inovasi nasional.

Dalam rangka memastikan kebijakan efisiensi anggaran berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh K/L terkait dan Komisi X DPR RI. Rekomendasi untuk K/L mitra Komisi X DPR RI:

1. **Pendekatan Berbasis Hasil (*Outcome-Based Budgeting*).** Alokasi anggaran sebaiknya didasarkan pada hasil jangka panjang yang diinginkan, bukan hanya *output* jangka pendek. Hal ini penting untuk sektor pendidikan dan riset yang dampaknya baru terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama.
2. **Digitalisasi dan Efisiensi Operasional.** Pemerintah dan K/L perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan, seperti pelatihan daring untuk tenaga pendidik dan digitalisasi administrasi.
3. **Prioritasi Program Esensial.** Program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan riset berbasis industri, harus menjadi prioritas dalam alokasi anggaran.
4. **Kemitraan dengan Sektor Swasta.** Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam pendanaan riset dan inovasi, untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak merugikan kepentingan publik.

Selain rekomendasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Komisi X DPR RI, yaitu:

1. **Evaluasi Berkala.** Komisi X DPR RI perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
2. **Penguatan Fungsi Pengawasan.** Komisi X harus memperkuat fungsi pengawasannya dengan memastikan bahwa K/L mitra kerja mereka menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan layanan esensial kepada masyarakat.
3. **Mendorong K/L untuk Fokus pada Sektor Prioritas.** Komisi X perlu mendorong kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan kebudayaan.
4. **Fasilitasi Dialog dengan Pemangku Kepentingan.** Komisi X dapat mengadakan forum atau dialog dengan para pemangku kepentingan (seperti akademisi, seniman, dan peneliti) untuk memahami secara langsung dampak kebijakan efisiensi dan mencari solusi yang lebih efektif.
5. **Pemantauan Implementasi Kebijakan di Daerah.** Komisi X sebaiknya memperluas pemantauan hingga tingkat daerah untuk memastikan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran tidak memperlebar kesenjangan layanan publik antara pusat dan daerah.

Daftar Pustaka

Ahdiat, A. (2025, Februari 3). Anggaran Kementerian 2025 Dipangkas Rp256 Triliun, Berapa Sisanya?, *Databooks*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67a0b11da9b3d/anggaran-kementerian-2025-dipangkas-rp256-triliun-berapa-sisanya>

Estherina, I. (2025, Januari 28). Sri Mulyani Rilis Daftar 16 Belanja Kementerian yang Terdampak Instruksi Pemangkasan Anggaran. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-rilis-daftar-16-belanja-kementerian-yang-terdampak-instruksi-pemangkasan-anggaran-1199806>

Kementerian Keuangan. (2024). Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA – K/L) Tahun Anggaran 2025. *Kementerian Keuangan*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6ecae803-b27d-4427-8ccf-3fca8bf2facb/03-BUKU-III-HIMPUNAN-RENCANA-KERJA-DAN-ANGGARAN-RAPBN-TA-2025.pdf>

Pusparisa, Y.D.R. (2025, Februari 2). Pemangkasan anggaran jangan korbankan layanan publik. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/lebih-dari-50-persen-anggaran-dipangkas-layanan-publik-berisiko-dikorbankan?utm_source=chatgpt.com

Siswanto, D. (2025, Februari 1). Ini 10 Kementerian/Lembaga dengan Pemotongan Anggaran Terbesar di 2025. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-10-kementerianlembaga-dengan-pemotongan-anggaran-terbesar-di-2025>

Widoyono, S. B., Said, A., Budiati, I., Reagan, H. A., Riyadi, Hastuti, A., Anam, C., Larasaty, P., Setiyawati, N., Hardika, B., Agusta, M. W., Arifin, M., Andriastuti, R. D., & Tama, D. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>

Yusrizal, M. R. (2025, Januari 31). Kemendiktisaintek akan bayar tukin dosen ASN untuk tahun 2025. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/kemendiktisaintek-akan-bayar-tukin-dosen ASN-untuk-tahun-2025-1201018>